

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah meneliti dengan berdasarkan dari uraian dan bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya keras untuk mencapai kinerja organisasi yang baik, khususnya dalam hal pelayanan informasi publik. KPU menunjukkan pemahaman yang baik dari SDM mereka mengenai jenis informasi yang layak dan tidak layak disebarluaskan, yang mencerminkan perhatian terhadap akurasi dan relevansi informasi. Meskipun tidak ada pelatihan formal, evaluasi rutin terhadap kinerja SDM dilakukan untuk memastikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu.
2. Pengelolaan informasi publik oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU, khususnya dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi informasi yang dilakukan melalui berbagai saluran seperti media sosial, website resmi, dan saluran offline mendukung pelaksanaan tahapan pemilu yang tepat waktu dan sesuai prosedur. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan ketimpangan akses informasi menyebabkan distribusi informasi tidak merata, sehingga beberapa kelompok masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mengakses media digital, kurang terjangkau. Hal ini berpotensi menghambat tercapainya IKU terkait partisipasi masyarakat yang luas dan inklusif, karena akses informasi yang terbatas dapat menurunkan minat dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu secara aktif. Selain itu, ketidakmerataan informasi juga dapat menimbulkan risiko konflik sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, yang berdampak pada pencapaian IKU pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari konflik

3. Meskipun tidak terdapat pengaruh eksternal yang signifikan, terdapat sejumlah kendala internal yang memengaruhi efektivitas pelayanan informasi. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, ketidaksiapan SDM akibat kurangnya pelatihan, sistem pengelolaan informasi yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Semua kendala tersebut berkaitan erat dengan faktor-faktor internal organisasi sebagaimana dijelaskan dalam teori David (2009), yang menekankan pentingnya kualitas SDM, ketersediaan anggaran, sistem informasi yang efektif, serta dukungan teknologi. Kendati demikian, organisasi menunjukkan kemampuan adaptif melalui pendekatan alternatif, seperti pemanfaatan badan ad hoc, yang mencerminkan fleksibilitas struktur organisasi dalam menghadapi tantangan di lapangan.
4. Pelayanan informasi publik oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, yang terwujud melalui penyediaan informasi lewat berbagai saluran resmi seperti website, media sosial, dan sosialisasi langsung. Kinerja SDM sebagai pelaksana teknis menjadi kunci utama, di mana meskipun belum ada pelatihan formal, evaluasi internal dan diskusi rutin membantu meningkatkan kapasitas mereka. Namun, masih terdapat tantangan terutama dalam pemerataan akses informasi karena keterbatasan kanal komunikasi dan pendekatan yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, serta minimnya mekanisme pengaduan yang efektif. Partisipasi masyarakat sudah didorong melalui sosialisasi, tetapi kelompok rentan seperti lansia dan warga di daerah terpencil masih sulit dijangkau, sehingga perluasan peran SDM dalam menjangkau komunitas kecil sangat diperlukan.

6.2 Saran

1. KPU dapat melakukan evaluasi dan restrukturisasi internal agar tugas-tugas pengelolaan informasi publik dapat dibagi lebih merata di antara pegawai yang ada. KPU sebaiknya mengoptimalkan peran pegawai yang sudah memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bidang pengelolaan informasi publik sebagai mentor atau koordinator dalam tim. Mereka bisa

membimbing rekan kerja yang kurang berkompeten melalui pelatihan internal atau pendampingan langsung. Dengan cara ini, beban kerja bisa terdistribusi secara lebih adil, sekaligus meningkatkan kemampuan seluruh pegawai secara bertahap tanpa harus langsung merekrut banyak tenaga baru dan mengeluarkan anggaran yang berlebihan.

2. KPU harus mengembangkan saluran distribusi informasi yang lebih beragam dan mudah dijangkau, tidak hanya melalui media digital tetapi juga pendekatan langsung berbasis komunitas dan media lokal. Strategi ini diperlukan untuk memastikan informasi pemilu dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan yang memiliki keterbatasan akses teknologi. KPU perlu mengembangkan sistem monitoring internal yang mampu mengevaluasi cakupan dan efektivitas distribusi informasi, sehingga dapat mengidentifikasi area yang belum terjangkau secara real time. Perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk menilai sejauh mana akses dan pemahaman publik terhadap informasi pemilu yang disediakan KPU.
3. Disarankan agar KPU memperluas jangkauan sosialisasi dan penyebaran informasi ke kelompok-kelompok yang selama ini kurang terjangkau, seperti lansia, ibu rumah tangga, warga di daerah terpencil, dan komunitas kecil lainnya. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan menggandeng organisasi lokal seperti PKK, kelompok pengajian, atau arisan warga untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif dan meningkatkan partisipasi dalam proses pemilu.